

Analisa simulasi bagi hasil pajak pertambahan nilai terhadap ketimpangan vertikal dan horizontal di Indonesia pada era desentralisasi

Amalia Rosadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=123317&lokasi=lokal>

Abstrak

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi tentang analisa bagi hasil PPN antara pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak bagi hasil PPN tersebut terhadap ketimpangan penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah (vertical imbalances) dan ketimpangan penerimaan antar pemerintah daerah (horizontal imbalances). Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Data yang dijadikan dasar dalam simulasi adalah data penerimaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dan APBD tahun 2004 dari Biro Pusat Statistik dan Departemen Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dengan mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN. Simulasi bagi hasil tanpa mengasumsikan tingkat pertumbuhan PPN hanya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah tetapi menurunkan penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis, simulasi bagi hasil PPN dengan menarik pajak hotel dan restoran lebih dapat memperbaiki kondisi vertical imbalances antara pemerintah pusat dengan daerah jika dibandingkan dengan simulasi bagi hasil PPN dengan tanpa menarik pajak hotel dan restoran.

Berikutnya metode bagi hasil PPN yang dapat menghasilkan distribusi dana bagi hasil yang paling merata adalah metode ENA atau Equity and Need Approach dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu ESNA atau Equity and Spesific Needs Approach dan ERA atau Equity and Revenue Approach. Akan tetapi distribusi bagi hasil PPN dengan metode ESNA lebih dapat mengurangi ketimpangan penerimaan antar daerah (horizontal imbalances) jika dilihat dari struktur alokasi dana bagi hasil PPN. Hal ini karena metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling tinggi bagi kelompok provinsi berpendapatan rendah dibandingkan dengan dua metode lainnya. Sebaliknya metode ini memberikan porsi alokasi dana bagi hasil yang paling rendah bagi kelompok provinsi berpendapatan tinggi dibandingkan dengan dua metode lainnya.